

# **KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENOPANG SOLIDARITAS KEBANGSAAN**

(Disampaikan pada Seri Dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Sekolah dan Masyarakat (LeKSeMa) di Hotel Grand-Q Kota Gorontalo 20 Oktober 2018)



**SUKARMAN KAMULI**

**NIP. 196706062000031001**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
2018**

## KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENOPANG SOLIDARITAS KEBANGSAAN<sup>1</sup>

SUKARMAN KAMULI<sup>2</sup>

Hidup menuntut kesadaran dalam menjalaninya. Hidup tidak sekedar menjalani rutinitas keseharian tanpa arah. Hidup yang bermakna harus mampu menjawab: apa/mengapa, bagaimana, dan nilai manfaat dari hidup itu. Benar apa yang dikatakan seorang ahli filsafat Rene Descartes “karena saya berfikir, maka saya ada”. Inilah makna “kesadaran” yang disandang makhluk manusia dalam kehidupannya dibanding dengan makhluk lainnya. Manusia tidak pernah berhenti berfikir sepanjang “kesadarannya” masih menyatu dalam hidupnya.

Manusia merasa bahagia manakala kebutuhan hidupnya terpenuhi secara seimbang lahiriah dan batiniah. Maslow (1943)<sup>3</sup> membagi lima tingkat kebutuhan manusia, yaitu: Fisiologis, Keamanan, Dicintai dan Mencintai, penghargaan dan aktualisasi diri. Tingkatan kebutuhan itu relative dalam implementasinya tergantung siapa yang menjalani kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia secara hakiki dijamin secara konstitusional (*Declaration of Human Rights*), konstitusi negara RI (UUD 1945 yang terjabarkan dalam pasal-pasalnya), maupun dalam aturan turunannya seperti UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Manusia dalam suatu negara atau lebih dikenal dengan warga negara dalam perspektif kebijakan public merupakan bagian tak terpisahkan dalam menentukan arah pembangunan suatu negara. Warga negara merupakan salah satu actor penting dalam merumuskan kebijakan negara disamping aktor-aktor lainnya. Menurut Winarno (2016: 9)<sup>4</sup> aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan terdiri dari actor-aktor resmi dan actor-aktor tak resmi. Actor resmi yaitu lembaga legislative, lembaga eksekutif/presiden dan lembaga yudikatif dan agen-agen pemerintah/birokrasi. Sedangkan actor tak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan salah satunya para warga negara individu yang tergabung dalam apa yang dinamakan gerakan *civil society* (lembaga-lembaga tertentu) yang mempunyai peran dalam merumuskan kebijakan. Suatu kebijakan tidak mungkin dirumuskan dalam ruangan yang hampa dan tanpa keterlibatan aktor-aktor penting dalam membicarakan hal-hal yang urgen untuk kepentingan public.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seri Dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Sekolah dan Masyarakat (LeKSeMa) di Hotel Grand-Q Kota Gorontalo 20 Oktober 2018.

<sup>2</sup> Staf Dosen Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial

<sup>3</sup> Maslow, Abraham. 1943. *A Theory of Human Motivation*.

<sup>4</sup> Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Center of Academic Publishing Service (CAPS). Yogyakarta.

## **Kebijakan dan keterlibatan Publik**

Dalam pandangan Thomas R Dye (1975)<sup>5</sup> kebijakan public dimaknai sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pernyataan ini tidak secara spesifik mengemukakan apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Apakah ketika pemerintah tidak melakukan atau diam sama sekali merupakan wujud suatu kebijakan atau pilihan yang terakhir? Tentunya tidak. Jika ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah untuk diikuti oleh masyarakat, maka masyarakat harus melakukannya, karena bagaimanapun pemerintah memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintah “sifat memaksa”. Sebaliknya jika ada tuntutan masyarakat, lalu pemerintah mendiamkannya maka itu adalah kebijakan pemerintah juga. Artinya pemerintah telah mengkaji dari berbagai hal untuk tidak melakukannya.

Lain halnya yang dikatakan oleh Andersen (1975)<sup>6</sup> bahwa kebijakan public merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Actor disini bisa di level elit (*top leader*), dan midle juga di level staff. Actor dalam hal ini dituntut memiliki kompetensi dibidangnya sehingga menjadi *problem solver* yang handal untuk menyelesaikan setiap masalah. Kuncinya sinergitas team work dan kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

Secara umum kebijakan public diidentikan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pemerintah. Pemerintah dianggap yang memiliki otoritas dalam segala hal. Mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian atau evaluasi kebijakan. Seiring perkembangan waktu dan kajian ahli kebijakan public, maka masalah-masalah dalam kebijakan public itu tidak lagi semata ranah pemerintah semata tetapi telah meluas hingga rakyat atau warga negara memiliki andil dalam proses kebijakan. Proses itu dimulai: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (William Dunn (1995)<sup>7</sup>.

## **Berbagai issue dalam Kebijakan Publik**

Awalnya yang menjadi konten dalam kebijakan public hanya berkisar pada tiga masalah utama, yaitu: 1) pertahanan; 2) hubungan luar negeri; dan 3) mempertahankan hukum dan ketertiban<sup>8</sup>. Seiring dengan perkembangan studi kebijakan public kontennya telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dan telah mencakup berbagai bidang, yaitu: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) perumahan; 4) pariwisata; 5) pertanian; 6)

---

<sup>5</sup> Thomas R. Dye. 1975. *Understanding Public Policy*. Second Edition., Englewood Cliff., N.J: Prentice Hall, hlm 1)

<sup>6</sup> James Anderson (1975). *Public Policy Making*. Second Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.

<sup>7</sup> William Dunn. 1995. *Analisa Kebijakan Publik*. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Hanindita Graha Widya.

<sup>8</sup> Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Center of Academic Publishing Service (CAPS). Yogyakarta.

industry; 7) perdagangan; dan 8) transportasi atau perhubungan. Luasnya konten studi kebijakan public memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut serta berperan dalam membicarakan kebijakan public disemua tingkatan. Setiap konten tersebut memunculkan berbagai issue yang mesti dicari akar masalahnya dan alternative pemecahannya. Akar masalah dan alternative pemecahan tidak semata didominasi oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, tetapi perlu pelibatan berbagai elemen dalam masyarakat.

Umumnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan public diperhadapkan pada dua hal, yaitu harus dilakukan secara procedural dan harus substantive (Theodore J. Lowi, 1964).<sup>9</sup> Prosedur merupakan langkah-langkah yang secara ketat dilalui agar terhindar dari penyimpangan dari kesalahan. Sementara secara substantive, kegiatan yang dilakukan tidak bergeser dari arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kenyataan yang terjadi, suatu kebijakan yang selalu menimbulkan masalah diakhir pelaksanaan kebijakan karena menyalahi prosedur dan substansinya. Oleh karena itu, agar setiap kebijakan dapat mencapai tujuan dan dapat terukur kinerja kebijakan tersebut, maka antara implementor kebijakan dan kelompok sasaran dipersyaratkan bisa membangun komunikasi yang saling memahami yang ditopang oleh ketersediaan sumber daya (SDM dan anggaran yang sesuai peruntukannya), sikap yang simpatik dan struktur birokrasi yang baik (Edwar III, 1980: 10)<sup>10</sup>.

### **Solidaritas Kebangsaan sebagai Spirit**

Suatu pertanyaan yang pernah menggema sekitar 137 tahun yang lalu di salah satu Perguruan Tinggi terkemuka di Perancis Universitas Sorbonne tepatnya tanggal 11 Maret 1882 ketika seorang sejarawan, filsuf, filolog, dan sastrawan Perancis yang bernama "Ernest Renan" yang lahir 28 Februari 1823 dan meninggal tahun 1892. Ketika menyampaikan orasi ilmiahnya di depan civitas akademika Universitas Sorbonne mengajukan suatu pertanyaan: "*What is a nation*". Dalam suatu tulisan yang diterjemahkan (Shidarta, 2016)<sup>11</sup> Ernest Renan menjawab pertanyaannya sendiri dengan mengatakan: "Jadi, sebuah bangsa adalah solidaritas besar, yang dibentuk oleh kesadaran bahwa solidaritas merupakan suatu pengorbanan banyak orang dan kesediaan dari banyak orang untuk berkorban. Ernest Renan meninggalkan pesan yang sangat bermakna dalam konteks hidup berbangsa, bahwa solidaritas besar yang dititipkan oleh para pendahulu / *founding fathers* dan saat sekarang kita nikmati patut dijaga untuk kelanjutan hidup bersama sebagai suatu bangsa. Pesan klasik yang sering kita dengar "bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa para pahlawannya".

Ujian berat atas solidaritas besar saat ini adalah kecendrungan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, membenarkan yang salah, bahkan merasa bahagia dengan "menghalalkan segala cara" untuk kepentingan segelintir kelompok atau golongan

---

<sup>9</sup> Theodore J. Lowi, 1964. *American Business Public Policy: Case Studies and Political Theory*. World Politics, XVI (July 1964)

<sup>10</sup> Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press

<sup>11</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2016/12/23/solidaritas-besar-bangsa-indonesia/>

tertentu yang sifatnya sesaat. Moment-moment tertentu yang sifatnya 5 (lima tahunan) seperti: pilkada, pilpres, dan pileg atau hal lainnya merontokkan solidaritas besar itu. Sebaiknya moment-moment itu menjadi spirit dalam memperkokoh semangat kebangsaan demi mempertahankan amanah para pendahulu bangsa ini.

Memang urusan solidaritas social berhubungan langsung dengan hati atau qalbu. Jika qalbu dijaga dan dihiasi dengan hal-hal positif, maka pasti qalbu itu tetap terjaga. Sebaliknya jika qalbu itu tidak dirawat bahkan dibiarkan mengikuti nafsu, maka merugikan sang pemilik qalbu itu.

Kondisi saat ini terkesan bahwa solidaritas social seakan pupus karena kepentingan sesaat. Berbagai kasus yang menimpa bangsa ini tidak pernah berakhir, seperti: korupsi, narkoba, kerusakan lingkungan, penyakit social (LGBT) dan lain-lain seakan menjadi indah dan kebanggaan. Agama seakan tidak menjadi rujukan dan pedoman dalam bertingkah laku, bahkan agama dijadikan sebagai barang dagangan untuk kepentingan golongan tertentu. Nilai-nilai ketuhanan, keadaban, persatuan, musyawarah, dan nilai keadilan yang substansial termaktub dalam Pancasila perlu dilestarikan sebagai modal utama membangun bangsa kini dan mendatang.

## **Lembaga Kajian Sekolah dan Masyarakat**

Alamat: Jl. Kihajar Dewantara No.99 Kota Gorontalo  
H.P: 0812-4349-2127

---

No: 22/K/10/18

HAL : Permohonan Narasumber

Kepada Yth

**Bapak Dr. Sukarman Kamuli, M.Si.**

*Universitas Negeri Gorontalo*

Di - Gorontalo

Dengan hormat,

Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan hidayahNya kepada kita dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih berkemajuan.

Lembaga Kajian Sekolah dan Masyarakat (LekSEMA) hendak memberi kontribusi dalam upaya membangun masyarakat yang lebih optimis, partisipatif dan tercerahkan. Untuk tujuan tersebut, kami mengadakan Seri Dialog yang rencananya akan dilaksanakan pada:

**Sabtu, 20 Oktober 2018, jam 9:00 s.d 12.00 WITA**

Di *Hotel Grand-Q*, Kota Gorontalo, Jl. Nani Wartabone No. 25, Kota Gorontalo.

Dialog ini bertujuan untuk memperkaya pandangan dan pengalaman bersama serta langkah-langkah nyata yang berjangka panjang untuk memperkokoh jati diri Indonesia sebagai bangsa majemuk, khususnya di Provinsi Gorontalo.

Dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak untuk membawakan materi "*Kebijakan Publik dalam Menopang Solidaritas Kebangsaan*".

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak, kami sampaikan banyak terima kasih

Direktur LekSEMA


**Basri Amin, S.Sos.,MA.,PhD-ABD**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jln. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo-96128  
Telp. (0435) 821125 Fax. (0435) 821752

---

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 439-K/UN47.D/PM/2018

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

**Dr. Sukarman Kamuli, M.Si**  
NIP. 196706062000031001

**Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo**

Untuk menjadi Narasumber/Pemateri pada kegiatan Seri Dialog yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di Grand Q Hotel Gorontalo.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 19 Oktober 2018

Ketua LPPM



**Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum**  
NIP. 196804091993032001


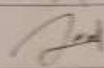

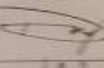

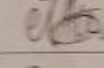


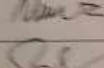
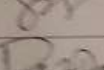










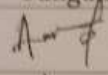

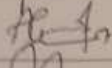




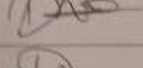
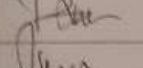
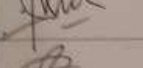

**LEMBAGA KAJIAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT  
(LekSEMA)  
DAFTAR HADIR PESERTA SERI DIALOG**

Gorontalo, Grand Q Hotel 19-20 Oktober 2018

No	Nama	Instansi/ Organisasi	Alamat/ No. HP	Tanda Tangan
1.	Asriana AP	universitas sehari Gorontalo	080556003348	
2.	LARAS LAMANTA	LSM		
3.	Yurani Damopolii	Uhm literasi UNG	08229729933	
4.	Abd. Rahuman Paikal	Uhm Literasi UNG	08229705379	
5.	Yulinda Elfriyanti	Uhm literasi UNG	08229727066	
6.	Mohamad Halada	Uhm literasi UNG	08055602785	
7.	Sri Selawati Hamopi	UNG	082291519274	
9.	Felci Aulia Abdulah	UNG	082291940100	
10.	Mehlys F Neuto		085256003822	
11.	Muhammad Sirin	LekSEMA	080093709944	
12.	Moh. Rezeki Daud	Leksema	082291460601	
13.	Ferrari Julia wati S.	FIS	08229182398	
14.	RAHMAT LIHAWA	UNG	082292001894	
15.	Tonny Mondong	FIS	081320574526	

LEMBAGA KAJIAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT  
 DAFTAR HADIR PESERTA SERI DIALOG

Gorontalo, Grand Q Hotel 19-20 Oktober 2018

No	Nama	Instansi/ Organisasi	Alamat/ No. HP	Tanda Tangan
16.	Ayus Polapa	IKHSAN		
17.	Fikar	UNSA		
18.	AHMAD HIRMAN JAW	BEM UNG	082243305799	
19.	Moh. Rizki Rahim	Senas PU UNG	0822-1500-2822	
20.	Farisandy R. Bando	BEM UNG	0815 5508 6910	
21.	LEONOR TILAMBO	BEM UNG	081359931168	
22.	PUSAN RUMAH	BEM UNG	082-455 675	
23.	<del>INTAG</del> INTAG MOHA	BEM UNG	082346402149	
24.	Rahman HANAN	BEM UNG		
25.	Muhammad Salim	LSM	082195272178	
26.	ALDIYAHSAH KUCIB	PERS	0822-9362-3408	
27.				
28.				
29.				